

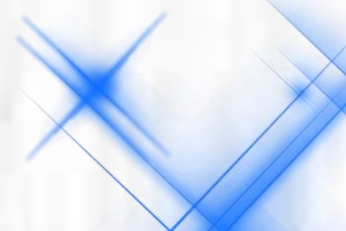
SOSIALISASI PROSES PERIZINAN ONLINE

KEMENTERIAN AGAMA R.I

31 Januari 2019



SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU

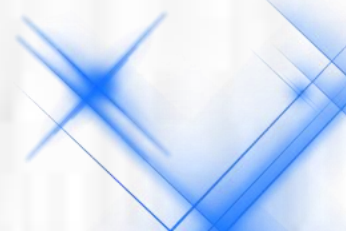


Portal Perizinan Online:

[HTTP://UMRAH.KEMENAG.GO.ID](http://UMRAH.KEMENAG.GO.ID)



SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU

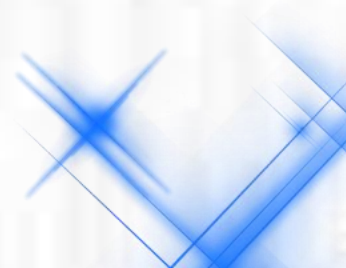


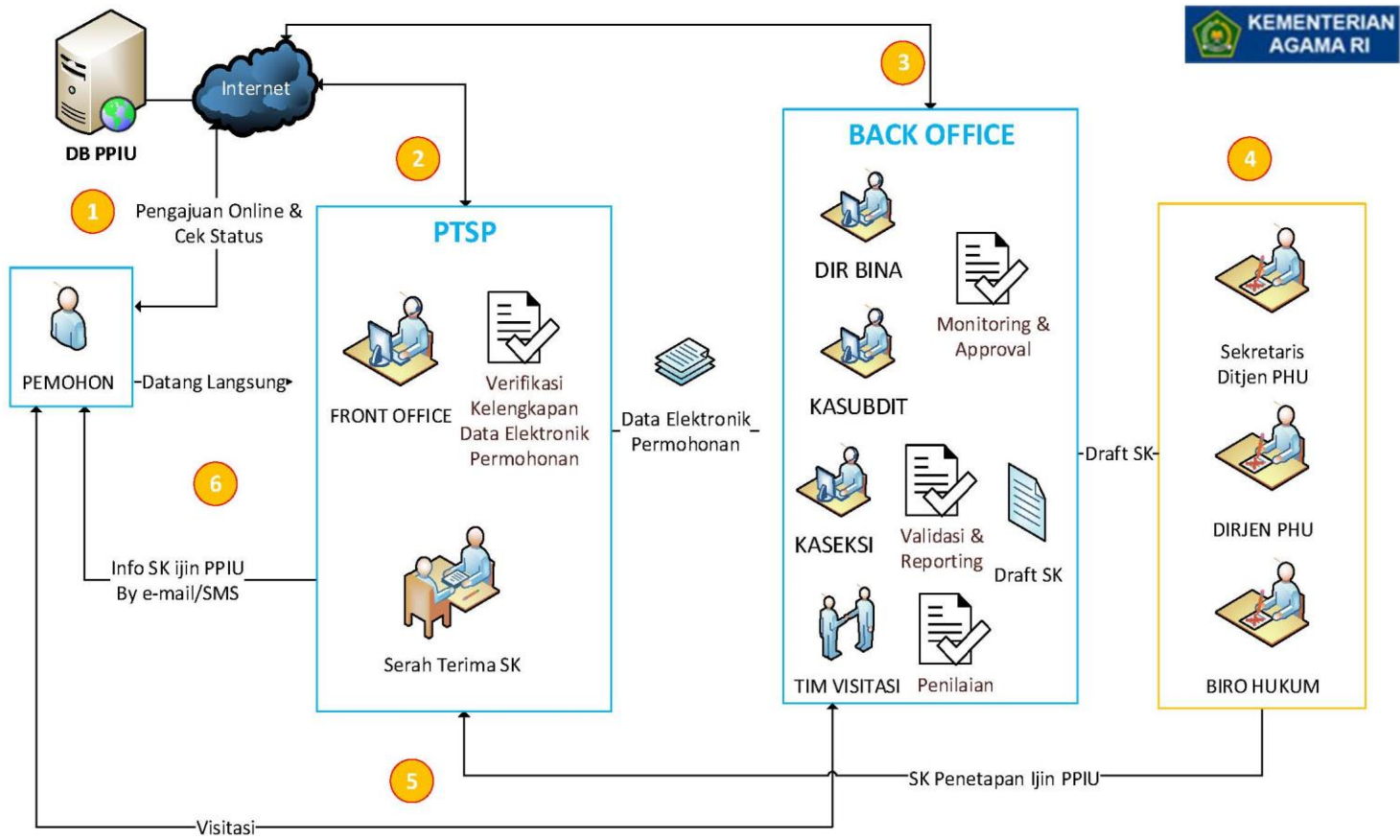
DASAR HUKUM

- 1 UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2008
- 2 PERATURAN PEMERINTAH NO. 79 TAHUN 2012
- 3 PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018

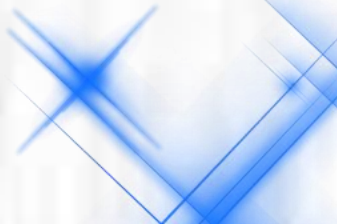


SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU



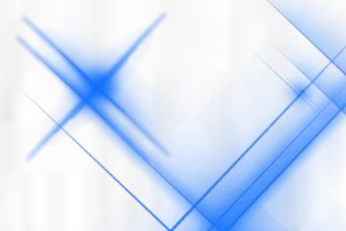


SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU



REGISTRASI DI PERIZINAN ONLINE HAL- HAL YANG HARUS DIPERSIAPKAN SEBELUM REGISTER

1. NPWP Perusahaan
2. Nama Perusahaan sesuai akte notaris
3. Email Resmi Perusahaan
4. Nomor Telepon Perusahaan
5. Nama Direktur Utama sesuai KTP
6. Nomor Handphone
7. Username SIMPU yang aktif



HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI PPIU

1. Scan Surat Permohonan Akreditasi yang ditandatangani Direktur Utama ditujukan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (ASLI, cap Perusahaan)
2. Scan Akta notaris pendirian perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASLI)
3. Scan Akta notaris perubahan terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (ASLI)
4. Scan surat pernyataan dari pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan/atau berdasarkan hasil pengawasan **dalam satu file**(ASLI)
5. Scan Surat Keterangan Usaha(SKDU) dari Pemerintah Daerah setempat yang masih berlaku

SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU



HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI PPIU

6. Scan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) atau Hergistrasi yang masih berlaku dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kote setempat yang membidangi pariwisata (ASLI)
7. Scan Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (ASLI)
8. Scan Surat Keterangan Fiskal dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perusahaan dan pimpinan perusahaan
9. Scan Sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori Biro Perjalanan Wisata yang masih berlaku
10. Scan LRPU Online (Laporan Rencana Perjalanan Umrah) dari Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan Umrah (SIMPU) atau SIPATUH

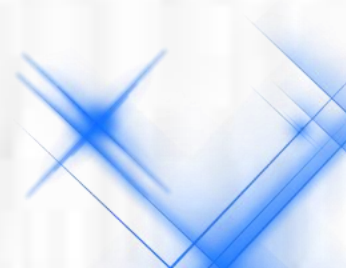


SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU



HAL-HAL YANG HARUS DISIAPKAN SAAT MENGAJUKAN PERMOHONAN AKREDITASI PPIU

11. Scan bukti kepemilikan atau sewa menyewa kantor pelayanan paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris (ASLI)
12. Scan SK PPIU terakhir
13. Scan Jaminan dalam bentuk Deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun (ASLI) senilai Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Berkas ASLI akan ditunjukkan bila dibutuhkan/diminta (ASLI)



TERIMA KASIH



SUBDIT PERIZINAN AKREDITASI DAN BINA PPIU

